

BAB II

TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN

2.1. Sasaran Pelita VI Propinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, maka sasaran umum pembangunan lima tahun ke enam adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Jawa Tengah melalui peningkatan peran serta, efisiensi, dan produktivitas rakyat dalam meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan batin.

Adapun sasaran bidang ekonomi adalah pemantapan industri yang mengarah pada penguatan, pendalaman, peningkatan, perluasan, dan penyebaran industri di daerah yang mempunyai potensi industri, dan makin kukuhnya struktur industri dengan meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dengan hilir, antara industri besar, menengah, industri kecil dan industri rakyat serta keterkaitan antara industri dengan sektor ekonomi lainnya, peningkatan diversifikasi usaha dan hasil pertanian serta peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian dengan tetap mempertahankan swasembada beras menuju swasembada pangan yang didukung industri, penataan dan pemantapan kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin sehat, tangguh dan mandiri serta berperan utama sebagai wadah perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat, peningkatan pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri dengan pola perdagangan dan sistem distribusi yang makin meluas dan mantap, yang secara keseluruhan dilaksanakan bersamaan dengan upaya peningkatan pemerataan melalui peningkatan kegiatan

ekonomi rakyat, kesempatan berusaha, lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

(Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun 1994/1995–1998/1999)

2.2. Prioritas Pelita VI Propinsi Jawa Tengah

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun keenam daerah dalam rangka pembangunan jangka panjang kedua, maka prioritas pembangunan lima tahun keenam daerah adalah pembangunan sektor-sektor dibidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dikembangkan sebagai berikut :

1. Penataan industri dan keterkaitan anatar industri dengan sektor lainnya yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri yang didukung kemampuan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia, ketangguhan pertanian, pemantapan sistem dan kelembagaan koperasi, penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi, pemantapan secara optimal dan tepat guna faktor produksi, sumber daya ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai prasarat terbentuknya masyarakat industri dengan tetap menjamin peningkatan keadilan, kemakmuran dan pemerataan

pendapatan serta kesejahteraan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pembanguna sumber daya manusia agar makin meningkat kualitasnya sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktifitas dengan pendidikan yang makin merata dan bermutu disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin mantap agar dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan pengkajian dan ahli teknologi.
3. Pembangunan bidang lainnya terus ditingkatkan seimbang serasi dan selaras, saling memperkuat dengan pembangunan bidang ekonomi sehingga keseluruhan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan gerak dalam mewujudkan masyarakat maju, sejahtera, mandiri, adil dan makmur dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal.

2.3. Kebijakan Umum Pelita VI Propinsi Jawa Tengah

Sejalan dengan kebijakan pembangunan lima tahun keenam nasional, maka kebijaksanaan pembangunan lima tahun keenam daerah Jawa Tengah yang bertumpu pada trilogi pembangunan dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut :

1. pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian guna meningkatkan kemampuan bersaing, dan menaikan pangsa pasar dalam negeri dengan selalu- memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan industri ditujukan untuk memperkuat struktur ekonomi di daerah dengan keterkaitan yang kuat dan saling menndukung antar sektor, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha sekaligus mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya.
2. pembangunan agro industri diarahkan pada pemanfaatan hasil pertanian secara optimal melalui pengembangan dan penguasaan teknologi, pemanfaatan hasil-hasil penelitian, sekaligus meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani dan produsen sengan industri.
3. pembangunan industri menghasilkan bahan baku, komponen dan bahan penolong sektor industri rancang bangun dan rekayasa diarahkan agar makin efesien dan mampu memenuhi kebutuhan industri lain sehingga mengurangi ketergantungan pada impor.

4. Pembangunan industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan industri rumah tangga serta industri rakyat tradisional diarahkan agar menjadi usaha yang makin efisien dan berkembang mandiri.
5. Pembangunan peternakan yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, nelayan, peternak, dan masyarakat pedesaan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta mengisi dan memperluas pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri sehingga mampu meningkatkan dan menganeekaragamkan hasil, meningkatkan mutu, dan derajat pengolahan produksi dan menunjang pembangunan wilayah.
6. Pembangunan pertanian diarahkan untuk tetap melanjutkan dan meningkatkan usaha diservikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian dengan perencanaan dan pengolahan pembangunan pertanian yang makin terpadu.
7. Pengolahan usah pertanian terutama yang dikaitkan dengan usaha agroindustri dan agrobisnis, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keunggulan komperatif dan kompetitif, keterampilan masyarakat pedesaan tersedia bahan baku yang cukup dan berkesinambungan, tersedianya investasi yang cukup serta tersedianya prasarana dan fasilitas pelayan lainnya di pedesaan diarahkan pada usaha

meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian untuk menjamin kesinambungan usaha pertanian.

8. Pengembangan usaha pertanian skala besar diarahkan pada upaya mendorong perkembangan dan keterkaitan yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan usaha pertanian rakyat dan koperasi dengan tetap memperhatikan kelestarian daya dukung sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.
9. Pembangunan perdagangan diarahkan pada terciptanya sistem perdagangan yang makin efisien dan efektif serta mampu memanfaatkan dan memperluas pasar.
10. Penyediaan kebutuhan pokok masyarakat lainnya, serta usaha pemasarannya disesuaikan dengan pola produksi dan konsumsi masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan dan jasa transportasi.
11. Pembangunan transportasi diselenggarakan secara efisien untuk dapat berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi.
12. Sistem transportasi disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, dan tingkat kemajuan teknologi.

(Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994/1995–1998/1999).

2.4. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah

2.4.1. Tahun 1995

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah tahun 1995, yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan 1993 adalah sebesar 7,39 %. Tingkat pertumbuhan riil tahun 1995 tersebut ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun yang sama, ialah sebesar 0,74%. Sehingga pada tahun 1995 terdapat kenaikan nyata dari PDRB perkapita sebesar 6,61%.

Dari indeks perkembangan PDRB Jawa Tengah tahun 1995 terhadap tahun 1993 dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun kebutuhan listrik dan air bersih sangat terasa sekali, perkembangan listrik tahun 1995 secara riil naik 31,78%. Sedangkan untuk sektor bangunan hanya naik sebesar 12,68%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang masih merupakan sektor dominan menunjukkan kenaikan diatas kenaikan rata-rata Jawa Tengah, dengan pertumbuhan riil sebesar 10,33% cukup memberikan sumbangan yang berarti bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 21,43% dengan 18,77% untuk sub sektor perdagangan besar dan eceran 0,40% sub sektor hotel dan 2,26% untuk restoran.

Begitu pula sektor angkutan dan komunikasi tahun 1995 secara riil naik 9,56% dengan sub sektor pengangkutan naik 7,68% dan komunikasi naik sebesar 19,50%. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang tidak kalah pentingnya didalam pembentukan PDRB Jawa Tengah. Untuk tahun 1995 sektor tersebut secara riil naik 5,62% dimana sub sektor Bank naik 7,76%

dan sub sektor jasa perusahaan naik sebesar 6,12%. Ini berarti bahwa kenaikan tersebut masih dibawah angka rata-rata Jawa Tengah.

2.4.2 Tahun 1996

TABEL 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1993
Serta Perkembangannya di Jawa tengah tahun 1993-1999

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Jumlah (Juta Rupiah)	Perkembangan	Jumlah (Juta Rupiah)	Perkembangan
1994	39303565,04	115,67	36.345.174,48	106,96
1995	46586032,91	137,10	39.013.952,64	114,82
1996	5250536063	154,52	41.862.203,72	123,20
1997	60296426,87	177,45	43.129.838,90	126,93
1998	84610222,51	249,01	38.065.273,35	112,03
1999	101373292,68	298,34	39.394.513,74	115,84

Sumber: BPS Jawa Tengah, PDRB Tahun 1994 - 1999

Dari tabel 2.1 diatas terlihat bahwa PDRB Jawa Tengah pada tahun 1996 atas dasar harga berlaku sebesar 52505,36 Jutaan rupiah. Selama kurun waktu 4 tahun (1994 – 1999), PDRB Jawa Tengah mengalami kenaikan 1,55 kali, dan secara konstan berkembang 1,23 kali.

Tabel 2.2
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Jawa Tengah
Tahun 1994 – 1999

Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	0,37	5,51	3,37	3,20	-3,35	3,07
2. Pertambangan dan Penggalian	6,21	8,94	11,85	11,35	-7,11	5,49
3. Industri Pengolahan	10,63	8,29	8,71	2,87	-14,61	2,82
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	15,88	14,91	14,03	13,47	3,64	10,38
5. Bangunan	5,23	7,08	11,24	6,37	-32,10	11,93
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,44	9,99	8,35	6,40	-9,00	3,20
7. Angkutan dan Komunikasi	7,85	9,56	12,88	3,61	-0,09	10,29
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,71	5,62	7,11	7,989	-34,20	3,77
9. Jasa-jasa	3,01	2,76	4,13	2,64	-9,60	-0,20
PDRB	6,96	7,34	7,30	3,03	-11,74	3,49

Sumber: BPS Jawa Tengah, PDRB Tahun 1994 – 1999

Seperti terlihat pada tabel 2.2 pada tahun 1996 pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sektor listrik, gas dan air bersih dengan kenaikan sebesar 14,03 %. Tingginya pertumbuhan sektor tersebut dikarenakan sampai saat ini kebutuhan listrik, gas dan air bersih dirasa masih banyak dan pemerintah senantiasa berusaha mencukupi akan permintaan konsumen, dengan jalan membangun pusat pembangkit listrik yang baru. Sektor bangunan juga berkembang sangat pesat pada tahun 1996 yaitu 11,24%. Sektor angkutan juga berkembang cukup pesat

yaitu 7,85% pada tahun 1994, 9,56%, pada tahun 1995 dan 12,88% pada tahun 1996. Pertumbuhan terendah diduduki oleh sektor jasa-jasa, hanya naik sebesar 4,13%. Rendahnya sektor jasa-jasa yang didalamnya termasuk sub sektor pemerintahan diharapkan secara nasional naik nol persen (*Zero growth*). Disamping itu peranan sub sektor pemerintahan memberikan sumbangan sangat besar terhadap sektor jasa sebesar 75 % lebih, sehingga pertumbuhan sektor jasa-jasa sangat dipengaruhi oleh sub sektor pemerintahan.

Tabel 2.3
Struktur Ekonomi Jawa Tengah
Tahun 1994 – 1999

Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	21,41	21,05	20,28	19,05	20,86	20,74
2. Pertambangan dan Penggalian	1,19	1,21	1,26	1,36	1,43	1,46
3. Industri Pengolahan	31,15	31,43	31,84	31,79	30,76	30,58
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,73	0,78	0,83	0,91	1,07	1,14
5. Bangunan	4,65	4,63	4,81	4,96	3,82	4,13
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,86	21,37	21,58	22,29	22,98	22,91
7. Angkutan dan Komunikasi	3,79	3,87	4,07	4,10	4,64	4,95
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,14	5,06	5,05	5,29	3,95	3,96
9. Jasa-jasa	11,08	10,60	10,29	10,25	10,50	10,13
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Jawa Tengah, PDRB Tahun 1994 - 1999

Dari tabel 2.3 diatas bisa dilihat bahwa, terdapat beberapa sektor yang peranannya terhadap perkembangan PDRB Jawa Tengah meningkat, ada juga sektor yang cenderung mengalami penurunan. Sektor-sektor yang dari tahun 1994-1999 mengalami kenaikan adalah sektor industri, listrik, gas dan air minum, serta sektor angkutan dan komunikasi. Keadaan ini bisa terjadi karena pertumbuhan sektor-sektor tersebut lebih cepat bila dibandingkan dengan sektor lainnya. Jawa Tengah yang merupakan sektor agraris sejak tahun 1992 struktur ekonominya sudah mulai digeser. Peranan sektor pertanian pada tahun 1996 hanya mampu memberikan sumbangan sebesar 20,27

Sektor industri sejak tahun 1993 sampai tahun 1996 mempunyai peranan yang cukup tinggi dalam perekonomian Jawa Tengah. Pada tahun 1993 sektor ini mempunyai peranan 30,12% meningkat menjadi 31,54% pada tahun 1996. Sektor perdagangan juga cenderung semakin penting dengan peranan 20,02% pada tahun 1993 menjadi 21,58% pada tahun 1996.

2.4.3. Tahun 1997

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 1997 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang lebih lambat.

Pada tabel 2.1 diatas terlihat bahwa PDRB Jawa Tengah pada tahun 1997 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 60.296426,87 jutaan. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 1993 sampai dengan 1997, PDRB Jawa Tengah atas dasar harga

mengalami kenaikan 1,77 kali dan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan 1,26 kali.

Sedangkan seperti terlihat pada tabel 2.2 pada tahun 1997 secara sektoral pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami penurunan untuk semua sektor kecuali sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 13,47%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan listrik dan air bersih semakin bertambah. Sektor pertanian, sektor industri, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi secara nyata terkena dampak krisis ekonomi yang ditunjukkan dengan menurunnya laju pertumbuhan sektor yang bersangkutan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan terendah dialami oleh sektor pertanian sebesar -3,20%. Turunnya sektor pertanian disebabkan pada tahun 1997 terjadi gagal panen pada beberapa komoditi tanaman. Hal ini mungkin disebabkan oleh harga pupuk yang meningkat sehingga petani mengurangi dosis pemakaian yang tentunya hal ini menurunkan produktivitas tanaman dibanding tahun 1996

Pada tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa sektor yang peranannya terhadap perkembangan PDRB Jawa Tengah meningkat, ada juga yang cenderung mengalami penurunan. Sektor-sektor yang dari tahun 1993 – 1997 mengalami kenaikan adalah sektor pertambangan dan penggalan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Keadaan ini bisa terjadi karena pertumbuhan sektor-sektor tersebut lebih cepat. Sejak tahun 1993 sampai tahun 1997 sektor industri memberikan sumbangan yang

paling dominan yaitu sebesar 31,79% pada tahun 1997. Sedangkan sektor pertanian peranannya terus menurun menjadi 19,05% pada tahun 1997. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi sudah bergeser dari perekonomian agraris menjadi industri.

2.4.4. Tahun 1998

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 1998 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibanding tahun sebelumnya.

PDRB Jawa Tengah pada tahun 1998 seperti terlihat pada tabel 2.1 diatas atas dasar harga berlaku sebesar 84610222,51 Jutaan Rupiah. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 1994 sampai tahun 1999, PDRB Jawa Tengah atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 2,48 kali dan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan 1,12 kali.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 1998 seperti terlihat pada tabel 2.2 secara sektoral hampir diseluruh sektor mengalami penurunan dan tumbuh negatif, kecuali sektor listrik, gas dan air bersih. Pertumbuhan positif yang dialami sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3,64% memberikan indikasi bahwa listrik dan air bersih merupakan kebutuhan penting dari masyarakat.

Sektor-sektor ekonomi lainnya yang berperan terhadap merosotnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, antara lain sektor industri pengolahan, bangunan, keuangan. Pertumbuhan terendah dialami oleh sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan (- 34,20 %), hal ini sebagai akibat kinerja perbankan yang tidak sehat.

Dampak krisis ekonomi secara langsung memberi pengaruh terhadap peranan sektor-sektor ekonomi. Pada tabel 2.3 dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa sektor yang peranannya terhadap perkembangan PDRB Jawa Tengah ada yang meningkat, ada juga yang cenderung mengalami penurunan. Sektor-sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa. Khusus untuk pertanian, dalam masa krisis jauh lebih tahan dibanding sektor-sektor lainnya sehingga peranannya meningkat.

2.4.5. Tahun 1999

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 1999 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

PDRB Jawa Tengah pada tahun 1999 seperti terlihat pada tabel 2.1 diatas atas dasar harga berlaku sebesar 101373292,68 jutaan rupiah. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 1994 sampai tahun 1999, PDRB Jawa Tengah atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 2,98 kali dan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan 1,16 kali.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 1999 seperti terlihat pada tabel 2.2 secara sektoral hampir di seluruh sektor mengalami kenaikan untuk semua sektor. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor bangunan sebesar 11,93%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor bangunan semakin dominan dalam meningkatkan PDRB.

Sektor-sektor ekonomi lainnya yang berperan terhadap naiknya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, antara lain sektor bangunan, listrik, gas dan air bersih, angkutan dan komunikasi. Pertumbuhan terendah dialami oleh sektor jasa-jasa sebesar - 0,20%. Hal ini sebagai akibat peranan sub sektor pemerintah yang memberikan sumbangan sangat kecil terhadap sektor jasa.

Krisis ekonomi pada tahun 1999 sudah mulai membaik meskipun belum pulih sepenuhnya. Pada tabel 2.3 dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa sektor yang peranannya terhadap perkembangan PDRB Jawa Tengah ada yang meningkat, ada juga yang cenderung mengalami penurunan. Sektor-sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih., sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi. Keadaan ini bisa terjadi karena pertumbuhan sektor-sektor tersebut lebih cepat.

Mulai Tahun 1997 - 1999 sektor industri sumbangannya semakin menurun sebesar 31,79% pada tahun 1997, 30,98% pada tahun 1998, dan 30,58% pada tahun 1999. Sedangkan sektor pertanian pada tahun 1997 - 1999 mulai meningkat kembali, sebesar 19,05% pada tahun 1997, 20,49% pada tahun 1998

dan 20,74% pada tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi sudah bergeser kembali menjadi perekonomian agraris.



2.5. Prioritas dan Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta

Tujuan pembangunan daerah kota Surakarta adalah mencapai tujuan akhir SALA KUNCARA, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan pembangunan Nasional yang tertumpu pada kondisi, potensi, peluang, permasalahan dan tantangan jaman/masyarakat. Strategi menuju tujuan dimaksud adalah sasaran pokok/andalan yang disebut PANCA KRIDA UTAMA yaitu menjadikan kota Surakarta sebagai kota Budaya, kota Tujuan Wisata, Pusat Pelayanan perdagangan dan Jasa, Kota Industri kecil dan Kerajinan Rakyat serta Kota Pendidikan dan Keterampilan. PANCA KRIDA UTAMA merupakan pedoman dalam mengimplementasikan pembangunan ke dalam bidang-bidang andalan.

Dampak krisis moneter yang mulai terjadi sejak pertengahan tahun 1997, dan berlanjut menjadi krisis ekonomi sangat terasa di daerah, sangat berpengaruh menjadi sendi-sendi kekuatan ekonomi masyarakat. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kelangkaan barang tertentu dan perubahan harga yang tidak menentu dan cenderung terus meningkat, telah menurunkan daya beli masyarakat sehingga semakin meningkatkan jumlah keluarga miskin serta meluasnya pengangguran terbuka. Dampak ekonomi ini apabila tidak segera diatasi akan meluas pada kehidupan sosial politik, yaitu semakin meningkatnya penyakit sosial dan akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya pemerintah.

Keadaan yang demikian sangat memerlukan upaya-upaya untuk segera mengembalikan kondisi ekonomi ke arah kondisi normal, dengan melalui tahap penyelamatan, pemulihan, stabilisasi dan pengembangan yang meliputi bidang ekonomi, politik, hukum dan agama serta sosial budaya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka disusun Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 1999/2000.

Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah sebagai prioritas dan alternatif dalam rangka penyelamatan dan normalisasi serta peningkatan kehidupan daerah disusun dengan tujuan untuk:

1. memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat di Kota Surakarta sehingga dapat keluar dari kondisi krisis ekonomi secepatnya.
2. mengembangkan kehidupan demokrasi dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kota Surakarta.
3. menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM) menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental aparatur, dunia usaha dan masyarakat Kota Surakarta.
4. meletakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, agama, dan sosial budaya.
5. mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Prinsip dasar yang dimiliki Kota Surakarta dalam melandasi reformasi, yaitu meliputi:

1. etika luhur: yaitu menjunjung tinggi ikatan moral dan etika profesi, organisasi maupun kehidupan sosial yang dikembangkan secara bersama-sama oleh aparatur, dunia usaha dan masyarakat.
2. kemanusiaan: Yaitu penyelenggaraan pembangunan yang memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.
3. ketaatan hukum: yaitu masyarakat yang menegakkan hukum sebagai tatanan guna menjaga ketertiban kehidupan masyarakat.
4. keterbukaan: yaitu terciptanya mekanisme saling mengontrol utamanya antara legislatif, eksekutif, yudikatif dan masyarakat, sehingga dapat membuka kran-kran komunikasi yang tersumbat.
5. partisipatif: yaitu keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengakomodasikan aspirasi masyarakat, sehingga makin meningkatkan kualitas manusia, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan upaya penghapusan kemiskinan.
6. keterpaduan: yaitu suatu mekanisme perencanaanpembangunan yang mengutamakan perencanaan dari bawah yang terpadu dengan perencanaan makro sektoral.
7. pemberdayaan: yaitu suatu pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada upaya-upaya memberdayakan kaum miskin, lemah dan kurang berdaya.

8. heterogenitas daerah: yaitu upaya memperhatikan dan mendayagunakan potensi dan kekayaan spesifik daerah agar berkembang secara optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. produktivitas: yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan aspek-aspek produktivitas dari segala potensi daerah.

Dalam memajukan perekonomian kota Surakarta BAPPEDA memiliki agenda di bidang ekonomi yaitu meliputi:

1. membuat perekonomian lebih efisien dan kompetitif dengan menghilangkan berbagai praktek monopoli serta mengembangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi.
2. meningkatkan keterbukaan pemerintah daerah dalam pengelolaan usaha untuk menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek-praktek ekonomi yang merugikan negara dan rakyat.
3. menyelenggarakan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan sistem penataan ruang, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. mewujudkan landasan ekonomi rakyat yang kuat.
5. kebijaksanaan mengutamakan kepentingan rakyat.
6. pengelolaan usaha yang terbuka melalui (a) pemberantasan praktek monopoli dan KKN, (b) menghilangkan ekonomi biaya tinggi, (c) meningkatkan peran koperasi sebagai lembaga perekonomian rakyat.

(Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 1999/2000)

2.6. Perkembangan PDRB Kota Surakarta

2.6.1. Tahun 1994 – 1995

Agregat PDRB Kota Surakarta Tahun 1994 atas dasar harga berlaku sebesar 1143122,48 jutaan rupiah dan atas dasar harga konstan tahun 1993 sebesar 1073359,77 jutaan rupiah sebagaimana terlihat dalam tabel 2.4 dan tabel 2.5.

Sumbangan masing-masing sektor terhadap pembentukan agregat PDRB di Kota Surakarta untuk sektor perdagangan, Hotel dan Restoran masih memegang peranan yang paling besar yaitu 242644,18 jutaan rupiah atau 21,27% atas dasar harga berlaku, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 1993 yaitu sebesar 233133,06 jutaan rupiah atau 21,72%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi wilayah kota Surakarta merupakan wilayah perdagangan. Selain sektor perdagangan, Hotel dan Restoran sektor yang cukup besar sumbangannya terhadap pembentukan PDRB kota Surakarta adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB adalah sebesar 18,63% atas dasar harga berlaku, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 1993 adalah sebesar 18,57%, sumbangan sektor ini mengalami kenaikan yang cukup berarti.

Sumbangan yang paling kecil adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 0,06% atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7.

Meskipun sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai sumbangan yang paling besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Surakarta, bukan berarti bahwa perkembangan pada sektor perdagangan ini adalah yang terbesar pula. Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, seperti terlihat pada tabel 2.8, sektor perdagangan mengalami perkembangan terkecil sebesar 12,87% dibandingkan sektor-sektor lain, seperti: sektor Pertanian; sektor Angkutan; sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; sektor Industri Pengolahan; sektor pertambangan dan Penggalian; dan sektor Bangunan, masing-masing atas dasar harga berlaku berturut-turut sebesar: 44,60%; 33,33%; 26,79%; 16,27%; 15,88%; 14,21%; 13,76%, jika dilihat berdasarkan harga konstan tahun 1993 seperti yang terlihat pada tabel 2.9, sektor perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami penurunan sebesar 8,35%. Ini berarti bahwa secara riil terdapat penurunan produksi pada sektor perdagangan tersebut.

Pada tahun tersebut ternyata sektor jasa yang mengalami pertumbuhan yang terkecil diantara sektor-sektor yang lain sebesar 5,74% atas dasar harga berlaku. Besar indeks perkembangan masing-masing dapat dilihat pada tabel 2.10 dan tabel 2.11.

Indeks Implisit PDRB kota Surakarta menunjukkan kenaikan harga secara agregat dari waktu ke waktu untuk masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 2.12. Dari tabel itu dapat dilihat indeks implisit baik secara agregat maupun secara sektoral. Secara agregat dapat dilihat bahwa indeks

implisitnya adalah sebesar 106,50%. Kalau dilihat secara sektoral maka ada beberapa sektor yang indeks implisitnya lebih besar daripada indeks implisit agregat kota Surakarta yaitu untuk sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; sektor Pertanian; sektor Pengangkutan dan Komunikasi; sektor Pertambangan dan Penggalan; dan sektor Industri Pengolahan. Ini berarti bahwa pada sektor-sektor tersebut yang paling banyak mengalami kenaikan harga dibanding sektor-sektor lain.

2.6.2. Tahun 1995 – 1996

Secara agregat pertumbuhan ekonomi kota Surakarta pada tahun 1995 sebesar 15,59%, sedangkan tahun 1996 12,63% yang dapat dilihat pada kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 1993 pada tabel 2.8 dan tabel 2.9, menunjukkan agregat PDRB kota Surakarta atas dasar harga berlaku tahun 1995 sebesar 1331166,12 jutaan rupiah dan tahun 1996 sebesar 1597183,04 jutaan rupiah. Jika dilihat atas dasar harga konstan 1993 PDRB kota Surakarta mencapai kenaikan dari 1166205,39 jutaan rupiah pada tahun 1995 menjadi 1374559,01 jutaan rupiah pada tahun 1996.

Sumbangan masing-masing sektor terhadap pembentukan agregat PDRB di Kota Surakarta untuk sektor Industri memegang peranan yang paling besar yaitu 396778,04 jutaan rupiah atau 24,84% pada tahun 1996, sedangkan pada tahun 1995 sektor perdagangan, Hotel dan Restoran memegang peranan yang paling besar, yaitu sebesar 285280,78 jutaan rupiah atas dasar harga berlaku. Jika dilihat atas dasar harga konstan sumbangan

sektor perdagangan, Hotel dan Restoran adalah sebesar 255234,46 jutaan rupiah atau 21,89% pada tahun 1995 dan 310776,01 jutaan rupiah atau 22,61% pada tahun 1996. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi wilayah kota Surakarta merupakan wilayah perdagangan. Dapat dilihat pula bahwa sumbangan sektor perdagangan pada tahun 1995 merupakan sumbangan yang terbesar dari sektor-sektor lainnya. Selain sektor perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor yang cukup besar sumbangannya terhadap pembentukan PDRB kota Surakarta pada tahun 1995 adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB adalah sebesar 18,78 % dan 16,60 % atas dasar harga berlaku. Sedangkan atas dasar harga konstan 1993 adalah sebesar 18,67 % dan 16,29 %. Sumbangan yang paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 1995 sebesar 0,06 % atas dasar harga berlaku. Sedangkan atas dasar harga konstan 1993 sebesar 0,06 % pada tahun 1995. Sumbangan masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7.

Meskipun sektor perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai sumbangan yang paling besar terhadap pembentukan PDRB kota Surakarta, bukan berarti perkembangan sektor perdagangan, terbesar pula. Dilihat dari indeks perkembangannya yang mengalami perkembangan terbesar atas dasar harga konstan 1993 adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi; sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; sektor Pertanian berturut-turut sebesar 165,39%; 143,17%; 135,78%. Sedangkan atas dasar harga berlaku,

perkembangan yang paling besar adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi yaitu sebesar 136,62%. Demikian pula atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 1995, perkembangan terkecil adalah sektor Jasa-Jasa sebesar 117,72%, dan atas dasar harga berlaku tahun 1995 pada sektor Jasa-Jasa sebesar 109,23%. Besar indeks perkembangan masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 2.10 dan tabel 2.11.

Indeks Implisit PDRB kota Surakarta menunjukkan kenaikan harga secara agregat dari waktu ke waktu untuk masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 2.12. Dari tabel itu dapat dilihat indeks implisit baik secara agregat maupun secara sektoral. Secara agregat dapat dilihat bahwa indeks implisit pada tahun 1996 adalah sebesar 116,76% dan 112,51% untuk tahun 1995. Dilihat secara sektoral indeks implisit terbesar pada tahun 1995 adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang berarti bahwa sektor tersebut yang paling banyak mengalami kenaikan harga dibanding sektor-sektor lainnya.

2.6.3. Tahun 1996 – 1997

Secara agregat pertumbuhan ekonomi kota Surakarta pada tahun 1996 sebesar 12,63% sedangkan tahun 1997 sebesar 8,01% yang dapat dilihat pada kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 1993. Seperti terlihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5. Menunjukkan agregat PDRB kota Surakarta atas dasar harga berlaku tahun 1996 sebesar 1597183,04 jutaan rupiah dan pada tahun 1997 sebesar 1725142,86 jutaan rupiah sedangkan atas dasar harga

konstan 1993 PDRB kota Surakarta sebesar 1374559,01 jutaan rupiah pada tahun 1996, menjadi 1432582,32 jutaan rupiah pada tahun 1997.

Sumbangan masing-masing sektor terhadap pembentukan agregat PDRB kota Surakarta pada sektor industri memegang peranan yang paling besar, yaitu 430787,95 jutaan rupiah atau 24,97% pada tahun 1997 dan sebesar 396778,04 jutaan rupiah atau 24,84% pada tahun 1996 atas dasar harga berlaku. Sedangkan jika dilihat atas dasar harga konstan 1993, sumbangan sektor industri adalah 333690,23 jutaan rupiah atau 24,27% pada tahun 1996 dan 345594,90 jutaan rupiah atau 24,12% pada tahun 1997. Hal ini menunjukan bahwa kondisi wilayah kota Surakarta merupakan wilayah Industri. Dapat dilihat pula bahwa sumbangan sektor industri dari tahun 1996 ke tahun 1997 atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami kenaikan. Selain sektor industri sektor yang cukup besar sumbangannya terhadap pembentukan PDRB kota Surakarta adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB adalah sebesar 22,56% pada tahun 1996 dan 22,86% pada tahun 1997 atas dasar harga berlaku. Sedangkan jika dilihat atas dasar harga konstan 1993 adalah sebesar 22,61% pada tahun 1996 dan 22,85% pada tahun 1997. Sumbangan yang paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu hanya sebesar 0,06% dan 0,07% pada tahun 1996 dan tahun 1997 atas dasar harga berlaku. Sedangkan jika dilihat atas dasar harga konstan 1993 adalah sebesar 10,06% pada tahun 1996 dan 0,06% pada tahun 1997. Sumbangan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB dapat dilihat pada

tabel 2.6 dan tabel 2.7. Pada tabel tersebut tidak terlihat pergeseran pola distribusi masing-masing sektor dari tahun ke tahun.

Meskipun sektor industri mempunyai sumbangan yang paling besar terhadap pembentukan PDRB kota Surakarta, bukan berarti perkembangan sektor industri yang terbesar pula. Dilihat dari indeks perkembangannya, yang mengalami perkembangan terbesar pada tahun 1996 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertambangan dan pengalihan, sektor pengangkutan dan komunikasi, masing-masing atas dasar harga berlaku berturut-turut adalah 174,73; 130,73; 130,46 di atas harga rata-rata. Sedangkan atas dasar harga konstan 1993, perkembangan yang paling besar terhadap tahun 1996 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, pertambangan dan pengalihan, dan sektor bank, lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan berturut-turut sebesar 198,40; 158,55; 154,93. Indeks perkembangan atas dasar harga berlaku pada tahun 1996 yang terkecil adalah sektor pertanian. Perkembangan terkecil pada tahun 1996 maupun 1997 atas dasar harga konstan 1993 maupun atas dasar harga berlaku adalah sektor pertanian. Besar indeks perkembangan masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 2.10 dan tabel 2.11.

Indeks implisit PDRB kota Surakarta menunjukkan harga secara agregat dari waktu ke waktu untuk masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 2.12. dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indeks implisit pada tahun 1997 sebesar 120,42% dan 106,76% untuk tahun 1996. Dilihat secara sektoral, indeks implisit terbesar adalah sektor pertanian yang berarti bahwa

pada sektor tersebut yang paling banyak mengalami kenaikan harga dibanding sektor-sektor lainnya.

2.6.4. Tahun 1997 - 1998

Pertumbuhan ekonomi kota Surakarta pada tahun 1998 mengalami penurunan yang drastis jika dibandingkan tahun 1997 yaitu minus (-) 0,77 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 1997 sebesar - 0,77. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 1997 sebesar - 0,77% maka pertumbuhan ekonomi tahun 1998 mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar - 9,77. Pertumbuhan ekonomi negatif (-) 0,77 persen ini bukan berarti tidak ada kegiatan ekonomi sama sekali, melainkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Surakarta pada tahun 1998 mengalami penurunan yang sangat tajam dengan tahun 1997.

Secara umum ada beberapa faktor sebagai penyebab terjadinya pertumbuhan minus (-) 0,77 persen ditahun 1997 antara lain;

- a. Adanya pola perubahan iklim, dimana perubahan iklim tersebut membawa pengaruh terhadap sektor pertanian.
- b. Krisis ekonomi yang sedang melanda bangsa Indonesia yang berdampak pada
 - tingginya harga barang baik makanan maupun non makanan serta jasa sebagai akibat dari naiknya biaya untuk memproduksinya.

- semakin rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya antara tingkat perubahan harga barang dan jasa dengan pendapatan masyarakat.

Sektor industri tetap memegang peranan penting terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Surakarta sektor ini memberikan sumbangan sebesar 24,97% terhadap total PDRB kota Surakarta atas dasar harga berlaku tahun 1997, sedangkan atas dasar harga konstan sumbangannya sebesar 24,12%. Pada sektor pertanian, sub sektor tanaman, bahan makanan memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan sektor lainnya. Sub sektor ini memberika andil sekitar 45% terhadap sektor pertanian pada tahun 1997 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Sedangkan sektor lain yang peranannya cukup besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto tahun 1997 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran ini tercatat sebesar 22,86% pada tahun 1997 menjadi 48,75% pada tahun 1998 atas dasar harga berlaku, sedangkan atas dasar harga konstan 1993 peranannya tercatat 22,86% pada tahun 1997 turun menjadi 22,60% pada tahun 1998. Secara lebih lengkap peranannya masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB ini dapat dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7.

Tabel 2.4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SURAKARTA
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1994 –1999
(JUTAAN RUPIAH)

Sektor –Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	30768,02	28908,65	23958,75	27029,26	48643,39	51341,81
2. Pertambangan dan penggalian	741,63	853,39	1029,55	1194,57	1312,98	1423,41
3. Industri Pengolahan	188944,53	220913,94	396778,04	430787,95	732447,65	770898,07
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	28248,26	36002,41	27478,42	30555,80	41977,09	44989,07
5. Bangunan	163052,14	186792,53	208708,01	221969,83	231194,60	250429,34
6. Perdagangan, Hotel Dan Restoran	242644,18	285280,78	360335,87	394446,25	462069,52	600208,61
7. Pengangkutan Dan Komunikasi	105188,30	141899,02	175330,63	189388,41	238910,73	273358,79
8. Keuangan Dan Jasa Perusabaan	213014,32	249972,31	208157,47	219192,69	207474,72	249159,73
9. Jasa-Jasa	170303,06	181543,06	195406,30	210578,10	256317,52	303366,20
TOTAL PDRB	1143122,48	1331166,12	1597183,04	1725142,86	2220348,20	2545175,03

Sumber: BPS Surakarta, PDRB Tahun 1994 - 1999

Tabel 2.5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SURAKARTA
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1994 –1999
(JUTAAN RUPIAH)

Sektor –Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	26056,99	24141,93	18913,12	18497,22	18645,31	19106,32
2. Pertambangan dan pengalihan	661,02	716,70	848,41	870,69	780,33	782,88
3. Industri Pengolahan	175409,44	190003,51	333690,23	345594,90	310318,03	313345,24
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	23826,01	25601,04	23450,67	24405,37	24262,51	24837,25
5. Bangunan	154535,82	167493,73	179644,77	186828,59	168023,90	169032,04
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	233133,06	255234,46	310776,01	327422,20	278598,90	280539,80
7. Pengangkutan dan Komunikasi	92475,68	109369,72	154414,71	160767,08	163187,86	166545,87
8. Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	199359,96	217721,01	168573,67	173060,69	99969,24	101614,92
9. Jasa-Jasa	167833,67	175923,26	184247,42	195135,63	169232,36	175003,09
TOTAL PDRB	1073359,77	1166205,39	1374559,01	1432582,37	1233018,44	1250807,41

Sumber: BPS Surakarta, PDRB Tahun 1994 - 1999

Tabel 2.6
Distribusi Persentase PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 1994 - 1999

Sektor - Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	2,69	2,05	1,50	1,56	2,18	2,01
2. Pertambangan dan penggalian	0,07	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06
3. Industri Pengolahan	16,53	23,82	24,84	24,97	33,00	30,29
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	2,47	1,72	1,72	1,77	1,90	1,77
5. Bangunan	14,26	13,19	13,07	12,87	10,41	9,84
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	24,25	22,64	22,56	22,87	20,81	23,58
7. Pengangkutan dan Komunikasi	9,20	10,13	10,98	10,97	10,76	10,74
8. Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	18,63	13,58	13,03	12,71	9,34	9,79
9. Jasa-Jasa	14,90	12,82	12,24	12,21	11,54	11,92
TOTAL PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Surakarta, PDRB Tahun 1994 - 1999

Tabel 2.7
Distribusi Persentase PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga konstan
Tahun 1994 - 1999

Sektor - Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	2,43	1,91	1,38	1,29	1,51	1,53
2. Pertambangan dan penggalan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3. Industri Pengolahan	16,34	24,04	24,48	24,12	25,17	25,05
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	2,22	1,71	1,71	1,71	1,97	1,99
5. Bangunan	14,40	13,30	13,06	13,02	13,63	13,51
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,72	22,62	22,61	22,85	22,59	22,43
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8,62	9,70	11,23	11,22	13,23	13,32
8. Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	18,57	12,69	12,26	12,08	8,11	8,12
9. Jasa-Jasa	15,64	13,97	13,41	13,62	13,73	13,99
TOTAL PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Surakarta, PDRB Tahun 1994 - 1999

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 1994 - 1999

Sektor - Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	44,60	-07,35	-21,66	9,37	0,80	2,47
2. Pertambangan dan penggalian	14,21	5,24	18,38	2,63	-10,38	0,33
3. Industri Pengolahan	15,88	8,32	10,26	3,57	-10,21	0,98
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	26,79	7,45	10,98	4,07	-0,59	2,37
5. Bangunan	13,76	8,35	7,26	4,00	-10,07	0,60
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,87	9,48	9,13	5,36	-14,91	0,70
7. Pengangkutan dan Komunikasi	33,33	18,27	21,19	4,11	1,51	2,06
8. Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	16,27	9,21	5,56	2,66	-42,23	1,65
9. Jasa-Jasa	5,74	4,82	4,73	5,91	-13,27	3,41
TOTAL PDRB	16,45	8,65	8,70	4,44	-13,93	1,44

Sumber: EPS Surakarta, PDRB Tahun 1994 - 1999

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga konstan
Tahun 1994 - 1999

Sektor -Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	22,39	-6,10	-17,12	12,82	79,97	5,55
2. Pertambangan dan penggalian	4,88	15,07	20,64	16,03	9,91	8,41
3. Industri Pengolahan	7,58	16,92	17,59	8,57	70,03	5,25
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	6,94	27,45	15,64	11,20	37,38	7,18
5. Bangunan	7,85	14,56	11,73	6,35	4,16	8,32
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,35	17,47	12,36	9,47	17,14	29,90
7. Pengangkutan dan Komunikasi	17,21	34,90	22,17	8,02	26,15	14,42
8. Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,82	17,35	8,21	5,30	-5,35	20,09
9. Jasa-Jasa	4,21	6,60	7,64	7,76	21,72	18,36
TOTAL PDRB	8,54	15,59	12,63	8,01	28,71	14,63

Sumber: BPS Surakarta, PDRB Tahun 1994 - 1999

Tabel 2.10
Indeks Perkembangan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 1994 - 1999

Sektor – Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	144,60	113,39	88,83	86,78	87,47	89,63
2. Pertambangan dan pengalihan	114,21	110,37	130,73	134,08	120,16	120,55
3. Industri Pengolahan	115,88	116,08	127,99	132,56	119,02	120,18
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	126,79	112,16	124,38	127,15	126,25	129,24
5. Bangunan	113,76	110,86	125,33	130,35	117,23	117,93
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	112,87	119,54	130,46	137,45	116,95	117,76
7. Pengangkutan dan Komunikasi	133,33	136,62	174,73	181,92	184,66	188,46
8. Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	116,27	118,85	125,46	128,80	74,40	75,62
9. Jasa-Jasa	105,74	109,23	114,40	121,16	105,08	108,66
TOTAL PDRB	115,59	108,54	128,19	134,19	115,50	117,17

Sumber: BPS Surakarta, PDRB Tahun 1994 – 1999

Tabel 2.11
Indeks Perkembangan PDRB kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 1994 - 1999

Sektor – Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	122,39	135,78	112,53	126,95	228,47	241,14
2. Pertambangan dan pengalihan	104,88	131,42	158,55	183,96	202,19	219,20
3. Industri Pengolahan	107,58	129,94	152,19	165,24	280,95	295,70
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	106,94	126,86	146,64	159,19	218,69	234,38
5. Bangunan	107,85	130,32	145,61	154,87	161,31	174,73
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	108,35	134,62	151,27	165,58	193,97	251,96
7. Pengangkutan dan Komunikasi	117,21	162,39	198,40	214,31	270,34	356,19
8. Keuangan dan Persewaan dan Jasa Perusahaan	108,82	143,17	154,93	163,14	154,42	185,45
9. Jasa-Jasa	104,21	117,72	121,33	130,75	159,15	188,36
TOTAL PDRB	108,54	132,67	149,67	161,59	207,97	238,40

Sumber: BPS Surakarta, PDRB Tahun 1994 – 1999

Tabel 2.12
Indeks Harga Implisit PDRB Kota Surakarta
Tahun 1994 - 1999

Sektor -Sektor	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	118,15	119,75	126,68	146,13	260,89	268,72
2. Pertambangan dan penggalian	108,90	111,48	121,35	137,20	168,26	181,81
3. Industri Pengolahan	107,72	111,48	118,91	124,65	236,63	246,02
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	118,56	113,09	117,93	125,20	173,01	181,14
5. Bangunan	105,43	111,52	116,18	118,81	137,60	148,15
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	104,17	112,61	115,95	120,47	165,85	213,95
7. Pengangkutan dan Komunikasi	113,75	117,58	113,55	117,80	146,40	164,13
8. Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	106,85	120,46	123,48	126,66	207,54	245,20
9. Jasa-Jasa	101,47	103,19	106,06	107,91	151,46	173,35
TOTAL PDRB	106,50	112,51	116,76	120,42	180,07	203,48

Sumber: BPS Surakarta, PDRB Tahun 1994 - 1999

2.6.5 Tahun 1999

Pengaruh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk kota Surakarta.

Pertumbuhan ekonomi kota Surakarta yang ada pada tahun 1997 hanya mengalami penurunan sebesar negatif – 0,77 persen pada tahun 1998 bahkan turun lagi menjadi negatif – 9,37 persen. Pertumbuhan ekonomi negatif tersebut dialami hampir di seluruh daerah tingkat II di Jawa Tengah.

Tabel 2.13

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1993
Serta Perkembangannya Di Kota Surakarta Tahun 1994 - 1999**

Tahun	PDRB			
	<u>Harga Berlaku</u>	<u>Perkembangannya</u>	<u>Harga Konstan</u>	<u>Perkembangannya</u>
	Jutaan Rupiah	Persen	Jutaan Rupiah	Persen
1994	1143122,48	115,59	1073359,77	108,54
1995	1331166,12	108,54	1166205,39	132,67
1996	1597183,04	128,19	1374559,01	149,67
1997	1725142,86	134,19	1432582,37	161,59
1998	2220348,20	115,50	1233018,44	207,97
1998	2545175,03	117,17	1250807,41	238,40

Sumber: BPS Kota Surakarta, PDRB dan Indeks Perkembangan Tahun

1994- 1999

Pada table 2.13 diatas dapat dilihat bahwa PDRB kota Surakarta pada tahun 1999 atas dasar harga berlaku sebesar 2545175,03 jutaan rupiah sedangkan atas dasar harga konstan 1250807,41 jutaan rupiah. Dengan kata lain jika dibandingkan dengan tahun dasar harga berlaku maka PDRB kota Surakarta mengalami kenaikan sebesar 1,17 kali atau hampir dua kali lipat, dan atas dasar harga konstan 1993 mengalami 2,38 kali.

Tabel 2.14
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta
Tahun 1994 – 1999

Tahun	Pertumbuhan (%)
1994	8,54
1995	15,59
1996	12,63
1997	8,01
1998	28,71
1999	14,63

Sumber: BPS Kota Surakarta, Laju Pertumbuhan Tahun 1994-1999

Dari 2.14 tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dimulai pada tahun 1995 sebesar 15,59% dan mulai menurun pada tahun 1996 dan 1997 mencapai 12,63% dan 8,01% pada tahun 1998 mulai mengalami kenaikan sebesar 28,71% dan pada tahun 1999 mengalami penurunan kembali sebesar 14,63%. Kondisi ini dipengaruhi

oleh turunnya nilai produksi di hampir semua sektor, utamanya sektor yang mempunyai peranan cukup besar terhadap pembentukan PDRB kota Surakarta yaitu sektor industri. Inflasi yang cukup tinggi juga mempengaruhi penurunan ini, khususnya di sektor jasa-jasa dan sektor bangunan atau konstruksi.

Tabel 2.15
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Surakarta
Tahun 1994 – 1999

Sektor/Tahun	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Pertanian	22,39	-6,10	-17,12	12,82	79,97	5,55
Pertambangan	4,88	15,07	20,64	16,03	9,91	8,41
Industri Pengolahan	7,58	16,92	17,59	8,57	70,03	5,25
Listrik, Gas dan Air Bersih	6,94	27,45	15,64	11,20	37,38	7,18
Bangunan	7,85	14,56	11,73	6,35	4,16	8,32
Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,35	17,47	12,36	9,47	17,14	29,90
Pengangkutan dan Komunikasi	17,21	34,90	22,17	8,02	26,15	14,42
Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,82	17,35	8,21	5,30	-5,35	20,09
Jasa-Jasa	4,21	6,60	7,64	7,76	21,72	18,36
PDRB Total	8,54	15,59	12,63	8,01	28,71	14,63

Sumber: BPS Kota Surakarta, Laju Pertumbuhan Tahun 1994 – 1999

Pada tahun 1999 secara sektorial pertumbuhan ekonomi mengalami untuk semua sektor kecuali sektor perdagangan dan keuangan. Pertumbuhan yang tinggi di sektor perdagangan sebesar 29,90% menunjukkan bahwa sektor perdagangan sangat dominan terutama di bidang sandang. Sedangkan kenaikan di sektor keuangan sebesar 20,09% menunjukkan krisis ekonomi tidak banyak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi sektor ini. Hal ini dikarenakan perputaran uang di

kota Surakarta masih sangat besar contohnya perputaran uang di pasar Klewer.

Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan yang paling rendah adalah sektor industri pengolahan. Hal ini dikarenakan pengaruh krisis ekonomi yang mengakibatkan tingginya indeks yang mendorong besarnya laju inflasi tahun 1999.

Tabel 2.16
Peranan Masing-Masing Sektor Dalam PDRB Total
Tahun 1994 – 1999
(dalam %)

Sektor/Tahun	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Pertanian	3,00	2,17	1,50	1,56	2,20	2,02
Pertambangan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Industri Pengolahan	16,53	16,59	24,84	24,97	32,99	30,29
Listrik, Gas dan Air Bersih	2,47	2,70	1,72	1,77	1,89	1,77
Bangunan	14,26	14,03	13,07	12,87	10,41	9,84
Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,23	21,43	22,56	22,86	20,81	23,58
Pengangkutan dan Komunikasi	9,20	10,65	10,10	10,99	10,76	10,74
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,76	18,78	13,03	12,71	9,34	9,78
Jasa-Jasa	14,90	13,60	12,23	12,21	11,54	11,92
PDRB Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Surakarta, PDRB Tahun 1994 – 1999

Pada table diatas dapat dilihat peranan masing-masing sektor terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 peranan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya. Sedangkan sektor yang peranannya makin kecil pada tahun 1999 adalah sektor Bangunan. Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian cenderung stabil dari tahun ke tahun.

